

### **BAB III**

## **KEBIJAKAN ADMINISTRASI *ONE COUNTRY TWO SYSTEM* DI NEGARA TIONGKOK**

Di dalam bab ini membahas mendalam tentang sejarah kebijakan administrasi *One Country Two System* (Satu Negara Dua Sistem) di negara Tiongkok. Pembahasan ini dimulai dari sejarah awal mula dirumuskannya kebijakan ini, dilanjutkan dengan tujuan dari perumusan kebijakan administrasi *One Country Two System* oleh pemerintahan Tiongkok. Dalam bab ini juga dibahas mengenai hubungan perumusan kebijakan satu negara dua sistem dengan Taiwan dan Hong Kong dan bagaimana proses integrasi yang dilakukan oleh Tiongkok kepada Taiwan dan Hong Kong sebagai bentuk dari kepentingan Tiongkok untuk mempertahankan kesatuan negaranya.

Pembahasan ini akan difokuskan pada bagaimana proses integrasi yang menjembatani Tiongkok untuk mencapai kepentingannya terhadap Hong Kong. Dengan adanya kepentingan Tiongkok terhadap Hong Kong, Tiongkok berusaha memberikan kebebasan otonomi sebagai salah satu bentuk integrasi yang dilakukan agar Hong Kong mau bergabung dengan Tiongkok. Hong Kong dijadikan sebagai wilayah administratif khusus (SAR) oleh Tiongkok sebagai bukti keseriusan Tiongkok dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan eksistensi dimata dunia. Dan yang terakhir akan dijelaskan fungsi dari *One Country Two System* sebagai bentuk dari kebijakan baru di Tiongkok setelah *One China Policy* yang sampai sekarang juga masih tetap berlaku.

#### **A. Sejarah *One Country Two System***

*One Country Two System* merupakan kebijakan administrasi yang dianut oleh Tiongkok selain kebijakan administrasi *One China Policy*. Kebijakan administrasi *One China Policy* dalam bahasa Mandarin yaitu “一个中国政策” ( Yi Ge Zhong Guo Zheng Che) yang berartikan Satu Tiongkok, harga mati bagi Tiongkok bahwa Taiwan masih berada di bawah teritori China dan negara lain harus menghormati dan mengakui kebijakan tersebut serta mengakui posisi Tiongkok bahwa dengan hanya memilih satu pemerintahan apabila ingin tetap bekerjasama dengan Tiongkok.

Kebijakan ini merupakan suatu prinsip yang menegaskan bahwa Taiwan dan Tiongkok daratan adalah satu bagian yang tidak

dapat dipisahkan dari satu “Tiongkok” (Chiang, 2004). Akan tetapi pada konsensus tahun 1992 terdapat modifikasi dari *kebijakan One China Policy* yang lebih tergantung kepada partai politik utama yang berkuasa. Prinsip ini mendapat perlawanan dari masyarakat Taiwan (Pendukung Gerakan Kemerdekaan Taiwan) yang mendorong untuk mendirikan “*Republic Of Taiwan*” dan menumbuhkan identitas terpisah dengan Tiongkok daratan yang disebut “*Taiwanization*”. Dengan adanya permasalahan tersebut maka pihak pemerintahan berusaha untuk mencari menyatukan kembali dengan merumuskan kebijakan baru *One Country Two System ini*.

“*One Country Two System*” dalam bahasa Mandarin yaitu 一国两制 ( Yi Guo Liang Zhi) yang berartikan satu negara dua sistem adalah sebuah kebijakan baru yang diadopsi pada tahun 1970 an dan pertama kali dirumuskan oleh Deng Xiaoping dengan tujuan penyatuan negara Tiongkok secara damai pada tahun 1980 an. Deng Xiaoping pada masanya sebagai kepala negara Tiongkok menyarankan bahwa adanya satu negara dua sistem sebagai salah satu bentuk yang menyatakan bahwa Tiongkok adalah satu, namun wilayah Tiongkok yang berbeda seperti Taiwan, Hong Kong dan Macau dapat mempertahankan sistem ekonomi dan administrasi mereka sendiri, sementara wilayah lain di negara Tiongkok masih menggunakan sosialisme dengan sistem karakteristik Tiongkok. Berdasarkan dengan diterapkannya kebijakan ini, ketiga wilayah tersebut dapat terus memiliki sistem pemerintahan sendiri, urusan hukum, ekonomi dan keuangan, politik dan termasuk hubungan dagang dengan negara-negara asing (Yang, 2014).

Kebijakan administrasi ini muncul diakibatkan adanya dua prinsip atau ideologi yang berbeda. Tiongkok daratan merupakan satu wilayah yang memiliki sistem sosialis, sedangkan Taiwan dan Hong Kong merupakan wilayah yang memiliki sistem kapitalis. Untuk menyatukan kembali beberapa wilayah ini, Tiongkok tidak bisa menginterfensi dengan cara pemaksaan untuk kembali dan menggunakan sistem sosialis seperti beberapa wilayah bagian yang ada diTiongkok daratan. Dengan kondisi yang berbeda, Tiongkok harus mencari celah untuk menyatukan kembali wilayah-wilayah bagian yang sudah terpisah dengan tidak mengganti sistem yang sudah diterapkan. Namun walaupun dengan dirumuskannya kebijakan administrasi ini bukan berarti kebijakan Tiongkok sebelumnya yaitu *One China Policy* dihapuskan, kebijakan satu Tiongkok ini masih aktif sampai sekarang ini dan di tambah oleh kebijakan *One Country Two System*.

Sebelum berlakunya kebijakan administrasi “Satu Negara, Dua Sistem” hanyalah berupa prinsip dasar yang bertujuan untuk memberikan otonomi tingkat tinggi kepada Taiwan sebagai wilayah administratif khusus (SAR) di Tiongkok jika reunifikasi damai antara kedua belah pihak tercapai dengan baik. Dalam Pasal 31 menjelaskan bahwa: "Negara dapat menetapkan wilayah administratif khusus bila diperlukan. Sistem yang akan dilembagakan di wilayah administratif khusus harus ditentukan oleh undang-undang yang disahkan oleh Kongres Rakyat Nasional dalam kondisi tertentu" (Cheng J. , 2013). Pasal ini merupakan penetat dasar konstitusional untuk berlakunya peraturan dasar hukum. Tepat pada tanggal 4 Desember 1982, Sesi Kelima Kongres Rakyat Nasional Kelima (NPC) telah menyetujui sebuah konstitusi baru di Tiongkok mengenai kebijakan administrasi *One Country Two System*.

Pada awalnya kebijakan ini dicetus dengan tujuan untuk merangkul kembali beberapa wilayah Tiongkok yang terpecah diakibatkan adanya penjajahan dan perperangan. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan prinsip dan ideologi sehingga wilayah yang sudah terpisah dengan Tiongkok sulit untuk kembali, kemudian munculnya kebijakan ini bertujuan untuk menjembatani hubungan yang lebih baik diantara Tiongkok dengan wilayah lainnya terutama wilayah seperti Taiwan, Hong Kong, dan Macau. Akan tetapi dengan penawaran seperti itu tidak dapat membuat Taiwan untuk kembali menjadi bagian dari Tiongkok sedangkan Hong Kong dan Macau tetap kembali kepada Tiongkok (Twu, 2017).

**Gambar 3.1**  
***One Country Two System***



Sumber : <http://sinophiles.slatetakes.com/index.php/2015/05/08/one-country-two-systems/>

## **B. Implikasi Kebijakan *One Country Two System* Bagi Wilayah di Tiongkok.**

Kebijakan *One Country Two System* yang lahir di Tiongkok merupakan suatu bentuk upaya dalam menyatukan beberapa wilayah Tiongkok yang menjadi daerah kolonial negara barat dan adanya perbedaan sistem yang diterapkan di wilayah tersebut. Pada awal dirumuskannya kebijakan ini adalah tertuju kepada dua wilayah yang menjadi target utama Deng Xiaoping pada masa pemerintahannya. Konsep ini akan melahirkan sistem *Special Administrative Region* di Tiongkok, dimana mereka yang kembali kepada Tiongkok berhak mendapatkan otonomi yang lebih tinggi serta kebebasan dalam mengatur sistem ekonomi maupun politik di wilayahnya masing-masing.

### **1. Taiwan**

Taiwan adalah suatu wilayah bagian Tiongkok yang terletak di lepas pantai tenggara Tiongkok, diantara laut Tiongkok selatan dan timur. Masyarakat Taiwan juga berasal dari suku Tionghua, kedatangan imigran Tiongkok ke Taiwan dimulai pada abad ke-17, namun Taiwan pernah diduduki oleh Belanda, Jepang dan Amerika Serikat.

Untuk mewujudnya reunifikasi Tiongkok adalah aspirasi umum oleh semua masyarakat Tiongkok baik dalam negeri maupun luar negeri. Partai komunis Tiongkok dan pemerintah Tiongkok bekerjasama dalam menyelesaikan reunifikasi ini demi tercapainya tujuan Tiongkok sebagai negara kesatuan. Pada tahun 1950 pemerintah Tiongkok mengajukan proposal damai kepada Taiwan, kemudian di tahun 1955 Perdana Menteri Zhou Enlai menyatakan bahwa “orang-orang Tiongkok bersedia, jika ada persyaratan, untuk membebaskan Taiwan dengan cara-cara damai”.

Pada tahun 1960, kepala negara Mao Zhedong mengatakan bahwa jika Taiwan dikembalikan kepada Tiongkok, kecuali urusan luar negeri tetapan harus ditangani oleh otoritas nasional, semua kekuatan militer, politik dan pemerintahan yang ditunjuk dapat didelegasikan oleh Taiwan itu sendiri, inilah mulai terbentuknya konsep “Satu negara, Dua sistem” yang di publikasikan pada era pemerintahan Deng Xiaoping. Pada bulan Januari 1979 Deng Xiapoing sebagai kepala negara Tiongkok mengemukakan konsep *One Country Two Sytem* dan menyatakan bahwa “selama Taiwan kembali ke pangkuan Tiongkok maka pemerintah Tiongkok akan bersedia menghormati

kenyataan dan sistem yang berlaku di Taiwan” (Ministry of Foreign Affairs of the Peoples's Republic of China, 2014)

Pada tanggal 30 September 1981, Ye Jianying sebagai ketua komite tetap Kongres Rakyat Nasional Tiongkok secara resmi mengajukan proposal sembilan poin untuk mewujudkan reunifikasi damai Tiongkok daratan dan Taiwan. Dengan adanya proposal pengajuan tersebut juga menyatakan bahwa jika Taiwan bergabung dengan Tiongkok maka pemerintah Tiongkok tidak akan melakukan intervensi terhadap Taiwan, Tiongkok akan memberikan kebebasan dalam berbagai hal seperti Taiwan diperbolehkan tetap memakai sistem yang sudah ada baik ekonomi maupun sosial politik dan hubungan kerjasama dengan negara-negara lain. Ketentuan mengenai pembentukan wilayah administratif khusus ditambahkan pada konstitusi dari Republik Rakyat Tiongkok berlalu pada sesi Kelima Kongres Rakyat Nasional pada tahun 1982. Pada tanggal 30 Januari 1995, Presiden Tiongkok Jiang Zemin menyampaikan sebuah pidato demi lancarnya proses reunifikasi yang berjalan di Tiongkok (Ministry of Foreign Affairs of the Peoples's Republic of China, 2014).

Namun pada kenyataannya, Taiwan itu sendiri tidak mau bergabung dengan Tiongkok walaupun dengan adanya proposal yang telah diajukan sebagai bahan pertimbangan kepada Taiwan. Li Denghui dan sejumlah kecil masyarakat Taiwan mengkhianati asas “Satu Tiongkok” dan meminta untuk diganti dengan asas “Satu Tiongkok, Satu Taiwan”. Selain dari pada permasalahan diatas, pemerintah Taiwan, yang dikenal secara resmi sebagai Republik China (ROC), dikenal secara luas sebagai satu-satunya pemerintah Tiongkok yang sah sampai Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi 2758 pada tahun 1971. Resolusi ini menggantikan ROC dengan saingan komunisnya, negara Tiongkok di PBB. Setelah perampasan kursi PBB telah meninggalkan Taiwan dalam kekosongan hukum global, negara-negara asing dan organisasi internasional telah menerapkan konsep hukum kreatif untuk menyelamatkan situasi (Hsieh, 2009).

Selain itu, dari perspektif hubungan internasional, Selat Taiwan, salah satu zona konflik yang paling mungkin terjadi di wilayah Asia-Pasifik, telah dijuluki sebagai "Semenanjung Balkan di Timur." Taiwan-Tiongkok, atau selat silang, menjadikan situasi semakin parah oleh lokasi geo-strategis utama Taiwan, yang telah menyebabkan kedaulatan di pulau ini tetap menjadi isu paling sensitif dalam hubungan Tiongkok-Amerika Serikat (Hsieh, 2009).

Melihat dari jalannya sejarah bagaimana upaya Tiongkok untuk melakukan reunifikasi dengan Taiwan, bahwasanya integrasi yang dilakukan Tiongkok tidak berhasil sehingga Taiwan tetap bertahan untuk mendirikan negara sendiri dan berdaulat dengan sistem negara demokrasi. Selain itu bertahannya Taiwan dengan sistem tersebut juga didorong oleh dukungan dari Amerika Serikat. Sejarah awal mula bagaimana Taiwan bisa menjadi negara dengan sistem demokrasi yaitu Taiwan terus berada di bawah pemerintahan darurat seperti yang dinyatakan di dalam “Undang-undang Darurat selama Pemberontakan Komunis” yang dalam karakter tradisionalnya yaitu “動員戡亂時期臨時條款” dan pemerintahan satu partai hingga empat dekade dari tahun 1948 ke tahun 1987, saat Presiden Chiang Ching-kuo dan Lee Teng-hui, yaitu merupakan seorang Presiden pertama yang berasal dari keturunan penduduk asli setempat, secara berangsur-angsur meliberalisasikan dan mendemokrasikan sistem pemerintahan.

Pada tahun 2000, Chen Shui-bian dari partai pro-kemerdekaan Partai Progresif Demokrat (DPP) memenangi pemilu presiden dan menjadi Presiden pertama Republik Cina yang bukan dari partai KMT. Dalam Pilpres yang berlangsung pada tahun 2004, setelah Insiden 319 yang terjadi satu hari sebelum hari pemilu. Chen dan wakil presiden Annette Lu tertembak sewaktu berpawai dalam satu kampanye di kota Tainan. Chen dilantik kembali sebagai Presiden Taiwan dengan kemenangan tipis 0,2%. Partai pimpinan Chen, DPP, juga gagal menguasai dewan majelis dengan memenangkan mayoritas kursi, dan kalah atas partai KMT yang menginginkan penyatuan kembali dengan Tiongkok Daratan pada tahun 2005. Akan tetapi, DPP berhasil menguasai Dewan Nasional Republik Cina.

Integrasi yang dilakukan oleh Tiongkok dalam tujuan reunifikasi ini tidak berjalan dengan lancar dan apa yang diupayakan oleh Tiongkok tidak berhasil. Taiwan tidak menerima tawaran dari Tiongkok walaupun dijadikan wilayah administratif khusus. Taiwan pada saat sekraang ini telah berdiri sendiri dan tidak lagi menjadi wilayah bagian dari negara Tiongkok, dimana semua sistem pemerintahan, ekonomi, militer, uang yang berlaku dan luar negeri diatur oleh pemerintahan Taiwan itu sendiri.

## 2. Hong Kong

Hong Kong merupakan salah satu wilayah yang dijadikan *Special Administrative Region* (SAR) oleh Tiongkok, dengan adanya kebebasan yang dimiliki Hong Kong dalam sistem pemerintahan, ekonomi, politik dan lainnya merupakan salah satu implikasi dari

adanya kebijakan *One Country Two System* yang sebelum Hong Kong kembali ketangan Tiongkok sudah diberlakukan oleh Tiongkok. Proses kembalinya Hong Kong kepada Tiongkok tidak jauh dari adanya kesuksesan integrasi yang terjadi diantara ketiga pihak yang bersangkutan, jalannya integrasi menimbulkan dampak terhadap kepercayaan satu sama lain dan bagaimana proses penyatuan kembali Hong Kong sebagai wilayah bagian Tiongkok. Hong Kong juga merupakan salah satu wilayah yang menjaji faktor pendorong lahirnya kebijakan *One Country Two System* di Tiongkok.

Berdasarkan komitmen pemerintah Tiongkok paska Deng Xiaoping untuk melanjutkan reformasi ekonomi dan integrasi lebih lanjut dari Tiongkok ke dalam ekonomi dunia, sangat tidak mungkin pemerintahan Tiongkok akan mengambil kebijakan yang diketahui akan membahayakan ekonomi Hong Kong yang kuat. Pada waktu Hong Kong kembali ke pangkuan Tiongkok di akhir 1970an, pemerintah Tiongkok menegaskan bahwa Tiongkok akan menjalankan konsep kebijakan *One Country Two System* dimana Hong Kong akan berada di bawah kedaulatan Tiongkok, namun Hong Kong akan tetap bisa mempertahankan identitasnya, menjalankan sistem yang berbeda terutama sistem ekonomi yang berorientasi pasar terbuka dan gaya hidup yang berbeda (Sherlock, Hong Kong and the Transfer to China: Issues and Prospects, 1997).

Mungkin perbedaan paling signifikan antara Cina daratan dan Hong Kong adalah bahwa daratan adalah komunis sementara Hong Kong memiliki demokrasi yang terbatas. Keduanya berbagi Presiden Cina sebagai kepala negara mereka. Namun, masing-masing memiliki kepala pemerintahan sendiri: Premier adalah kepala Cina daratan, sedangkan Kepala Eksekutif adalah kepala Daerah Administratif Khusus Hong Kong.

*Chief Executive* (Kepala Eksekutif) bertanggung jawab kepada Pemerintah Pusat Rakyat. Masa jabatan Kepala Eksekutif adalah selama lima tahun, dan setiap orang dapat melayani untuk maksimum dua istilah berturut-turut. Kepala Eksekutif ini merupakan jabatan pemerintahan tertinggi di Hong Kong, yang dibentuk untuk menggantikan jabatan Gubernur Hong Kong saat Hong Kong masih menjadi koloni Inggris. Kepala Eksekutif Hong Kong pertama adalah Tung Chee Hwa yang mulai menjabat di tahun 1997, menggantikan Chris Patten, yang menjabat sebagai gubernur terakhir di Hong Kong.

Hong Kong juga memiliki sistem hukum dan peradilanannya sendiri (termasuk kepolisian khusus), organisasi distrik (tanpa kekuatan politik) dan pegawai negeri, secara luas berdasarkan model

hukum umum Inggris. Namun, untuk masalah kepemilikan tanah dan keluarga, Hong Kong beralih ke model hukum adat Tiongkok. Hal ini muncul diakibatkan kembalinya Hong Kong ke pangkuan Tiongkok dan adanya beberapa hal yang memang harus disepakati oleh Hong Kong dan Tiongkok dalam proses penyatuan kembali wilayah yang sebelumnya terpisah.

### **C. Proses Negosiasi Antara Hong Kong dan Tiongkok Untuk Mencapai Integrasi yang Sama-sama Diinginkan oleh Kedua Belah Pihak.**

Integrasi yang terjadi antara Hong Kong dan Tiongkok merupakan satu bentuk penyelesaian permasalahan berupa perbedaan prinsip ataupun sistem yang diterapkan, sehingga muncul suatu kendala dalam penyatuan kembali kedua komponen ini. Walaupun demikian, Tiongkok berusaha menawarkan berbagai hal sebagai bentuk negosiasi dengan Hong Kong termasuk pemerintahan Inggris yang masih memiliki hak untuk menentukan Hong Kong pasti atau tidak akan kembali ke pangkuan Tiongkok.

Salah satu konsep yang ditawarkan oleh Tiongkok kepada Hong Kong yaitu Tiongkok akan menjalankan kebijakan *One Country Two System* dan SAR sebagai salah satu bentuk praktek dalam pelaksanaannya. Konsep ini merupakan salah satu cara negosiasi yang dilakukan oleh Tiongkok agar Hong Kong menerima tawaran dari Tiongkok untuk bergabung kembali dan berada di bawah kedaulatan Tiongkok.

Berkaitan dengan pasal 31 yang menyediakan dasar konstitusional untuk pembentukan wilayah administratif khusus yang memiliki perbedaan sistem sosial dan kebijakan berbeda dengan wilayah lain di Tiongkok, dikarenakan tujuan reunifikasi damai yang menjadi kepentingan Tiongkok. Setelah penyelidikan dan penelitian mendalam, pemerintah China merumuskan 12 kebijakan dasar mengenai pertanyaan Hong Kong, yang dikenal sebagai "12 Prinsip" pada awal 1983. Isi dari prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Tiongkok berupa pemerintah Tiongkok meresmikan kedaulatan Hong Kong pada tanggal 1 juli 1997, setelah pelaksanaan kedaulatan Hong Kong akan menjadi wilayah administrasi khusus di Tiongkok, Hong Kong akan berada di bawah wewenang pemerintah Tiongkok dan akan menikmati otonomi tingkat tinggi, seperti sistem pemerintahan akan diurus sendiri oleh penduduk asli Hong Kong.

Sistem sosial dan ekonomi saat ini di Hong Kong akan tetap tidak berubah, dan begitulah gaya hidup. Kebebasan, termasuk pidato,



pers, perakitan, asosiasi, perjalanan, pergerakan, korespondensi, dan kepercayaan religius akan dipastikan di Hong Kong. Kepemilikan pribadi, kepemilikan perusahaan, hak sah warisan dan investasi asing akan dilindungi undang-undang. Hong Kong tetap menjadi pelabuhan bebas, dan pusat kerjasama ekonomi dengan berbagai negara asing. Dengan menjadi wilayah bagian dari Tiongkok, Hong Kong akan lebih leluasa dalam menjalankan beberapa kerjasama baik pemerintah, organisasi, budaya dan lainnya dengan wilayah bagian Tiongkok lainnya. Pemeliharaan ketertiban umum di Hong Kong akan menjadi tanggung jawab pemerintah Hong Kong. Semua kebijakan yang disebutkan dan dijelaskan di atas akan diatur dalam Undang-Undang Dasar Hong Kong oleh NPC Tiongkok dan akan memiliki perubahan setelah 50 dari ditetapkannya Hong Kong sebagai wilayah administrasi khusus (Yang, 2014).

Hong Kong merupakan satu wilayah bagian Tiongkok yang memiliki tingkat negosiasi yang lumayan baik, dikarenakan kemajuan Hong Kong dalam bidang ekonomi mampu menjadi faktor kualitas keberhasilan negosiasi yang dilakukan oleh Hong Kong kepada Tiongkok. Pendekatan utama Hong Kong untuk bernegosiasi dalam ranah kerjasama ekonomi adalah menggunakan metode tawar-menawar distributif dan kontingensi. Di Hong Kong, pihak pembeli berada dalam posisi superior, dan kedua belah pihak dalam kesepakatan bisnis memiliki tanggung jawab untuk mencapai kesepakatan. Mereka mengharapkan komitmen jangka panjang dari mitra bisnis mereka dan akan fokus terutama pada keuntungan jangka panjang. Meskipun gaya negosiasi utama adalah kompetitif, Hong Kong dan Tiongkok tetap menghargai hubungan jangka panjang.

Negosiasi di Hong Kong berlangsung secara damai, jika ada pertikaian diantara kedua belah pihak maka diadakan kompromi yang mana bertujuan untuk menyatukan kembali kedua belah pihak untuk mendapatkan manfaat dari hasil kerjasama yang dilakukan. inilah hal serupa yang terjadi diantara Hong Kong dan Tiongkok dimana antara kedua komponen ini mampu mempertahankan kerjasama jangka panjang walaupun dalam praktek pelaksanaannya terdapat beberapa perbedaan. Negosiator Hong Kong akan mengumpulkan informasi terlebih dahulu sebelum masuk kepada tahap perundingan, dimana ini menandakan bahwa Hong Kong sangat siap untuk menghadapi perundingan dan memiliki jalan tersendiri dalam penyelesaian perbedaan pendapat. Seperti halnya Tiongkok yang ingin Hong Kong kembali ke pangkuannya, Hong Kong terlebih dahulu mendiskusikan rincian dari tawaran Tiongkok, dan membahas mengenai konsesi yang

akan diterima oleh Hong Kong setelah bergabung kembali dengan Tiongkok (Katz, 2008).

Ketika perundingan terjadi antara Hong Kong, Tiongkok dan Inggris mengenai persoalan pengembalian Hong Kong ke pangkuan Tiongkok, hasil dari perundingan yang dilakukan membutuhkan waktu yang sangat lama. Tetapi pelaksanaan perjanjian berlangsung sangat cepat sampai diresmikannya Hong Kong kembali ke pangkuan Tiongkok. Adanya penawaran diantara kedua pihak terutama berdasar dengan 12 kebijakan dasar yang dikemukakan oleh Tiongkok dalam menjawab pertanyaan Hong Kong, sebagai bentuk konsesi yang diberikan oleh Tiongkok kepada Hong Kong, sehingga ketika Hong Kong bergabung dengan Tiongkok, Hong Kong menjadi salah satu wilayah administratif khusus yang memiliki otonomi yang sangat tinggi.

Pengambilan keputusan Hong Kong dalam perundingan ini juga disertai dengan dorongan pihak lain, dimana Hong Kong sendiri berani mengambil resiko atas apa yang telah diputuskan. Meskipun perjanjian sementara biasanya disimpan, Hong Kong tidak menganggapnya sebagai perjanjian akhir. Mengenai perjanjian dan kontrak, kontrak akhir yang ditandatangani oleh kedua belah pihak merupakan perjanjian yang mengikat. Hong Kong dipengaruhi oleh dua pandangan yang sangat berbeda tentang peran perjanjian dan kontrak. Di satu sisi, posisi tradisional Tiongkok adalah bahwa perjanjian hanyalah rujukan yang berlaku pada waktu tertentu dan bersifat akhir. Hong Kong memandang kontrak sebagai catatan yang mendokumentasikan maksud dari hubungan kerja pada saat mereka berunding dan menandatangani, bukan sebagai perjanjian akhir yang dapat bertahan dalam ujian litigasi. Di sisi lain, ada pengaruh Inggris, yang menentukan kontrak yang dianggap serius dan diikuti ke dalam perjanjian dan penyuratan. Akibatnya, kontrak akhir biasanya dapat dipercaya, meskipun selalu bijaksana untuk memelihara hubungan Tiongkok dengan mitranya Hong Kong secara berkelanjutan.

Dengan dilakukan integrasi ini, Hong Kong pada akhirnya kembali ke pangkuan Tiongkok dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua pihak serta adanya penyerahan secara resmi oleh pemerintah Inggris kepada pemerintah Tiongkok. berdasarkan teori yang digunakan yaitu rasional integrasi yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Tulus Warsito, M.Si. dimana Hong Kong bergabung dengan Tiongkok merasa rugi, akan tetapi terdapat konsesi bagi Hong Kong atas beberapa hal sehingga Hong Kong menerima negosiasi dari Tiongkok dan kembali ke pangkuan Tiongkok secara damai.

Hasil dari negosiasi tiga pihak diantara HongKong, Tiongkok dan Inggris adalah Deklarasi Bersama Inggris-Tiongkok pada 19 Desember 1984. Deklarasi ini berisi rincian mengenai keistimewaan yang akan dimiliki Hong Kong sebagai SAR setelah kembali ke pangkuan Tiongkok. Isi dari deklarasi ini menyatakan bahwa Hong Kong menyetujui dua belas prinsip yang diajukan Tiongkok terkait dengan statusnya setelah bergabung dengan Tiongkok.